

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan Negara Indonesia yang dikenal sebagai pemerintah pusat dimana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan pemerintahan yang merupakan kekuasaan presiden untuk melaksanakannya dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka perlindungan, pelayanan, wewenang, dan pembangunan daerah. Dalam memudahkan pemerintah pusat dalam melayani, menyejahterakan masyarakat, dan penataan pemerintah maka Negara Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi. Desentralisasi didasarkan pada asas pemerintahan sendiri di mana penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dimana sesuai dengan asas otonomi daerah. Wujud dari diterapkannya sistem desentralisasi ini adalah adanya sebuah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan warga negara setempat menurut sistem negara kesatuan. Daerah otonom sendiri dipimpin oleh seorang kepala daerah yang menjadi bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah penyelenggara pemerintahan daerah dimana hal tersebut menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah di bawah pemerintahan bersama berdasarkan asas otonomi dan asas otonomi yang tertuang dalam sistem dan asas yang terkandung dalam negara kesatuan Indonesia.

Dalam menerapkan otonomi daerah untuk pemerintahan daerah sendiri tentu sumber pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dari sumber pendanaan. Sumber pendanaan digunakan untuk melaksanakan atau merealisasikan otonomi daerah yang berasal dari potensi suatu daerah sendiri yaitu dilihat dari adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membantu menjadi penyangga atau pondasi utama dalam membiayai pembangunan pada daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Carunia (2017), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber dalam wilayah tersebut, semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah untuk melakukan kegiatan pembangunan daerahnya. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sangat menentukan bagaimana jadinya kinerja keuangan daerah tersebut.

Komponen penting yang berada dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu ada retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, retribusi daerah (selanjutnya disebut retribusi daerah) mempertimbangkan pemberian jasa atau izin khusus yang dikeluarkan secara khusus oleh pemerintah daerah atas jasa atau pelaksanaan retribusi daerah. Layanan ini dikeluarkan untuk orang perseorangan atau badan. Menurut Windhu (2018), retribusi daerah merupakan suatu iuran yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah daerah dimana dapat dipaksakan yang kemudian mendapatkan prestasi kembali secara langsung. Faktor yang mencolok dalam menghimpun pendapatan asli daerah dan memungut sumber pendapatan asli daerah (PAD) lainnya adalah ada tidaknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam kasus pembalasan lokal itu sendiri, layanan disediakan atau dimungkinkan oleh pemerintah negara bagian. Periode pembayaran daerah adalah periode di mana pajak diperlukan untuk penggunaan layanan dan izin tertentu dari pemerintah negara bagian masing-masing.

Pada hasil penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan (I Putu Agus Sudarmana & Gede mertha Sudiarta, 2020) menjelaskan bahwa untuk hasil analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Karena, semakin banyaknya penerimaan dari retribusi daerah, maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya pendapatan asli daerah.

Komponen penting lainnya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak daerah (selanjutnya disebut pajak) adalah wajib atau diwajibkan oleh orang perseorangan atau badan hukum untuk membayar kepada daerah yang diwajibkan oleh undang-undang tanpa tanggapan langsung. kontribusi yang sah. Ini digunakan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016), pajak daerah adalah iuran yang dibayarkan warga negara kepada negara, ditempatkan dalam kas negara dan diberlakukan tanpa imbalan langsung. Kedudukan suatu pajak daerah setiap tahunnya harus ditentukan targetnya. Penentuan dari target ini dapat membantu merealisasikan adanya pajak daerah, sehingga dengan adanya target tersebut dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan (Meisi Rerung, 2021) mengatakan bahwa hasil pada pengujian pajak daerah dihasilkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar atas pendapatan asli daerah di Kabupaten Tana Toraja.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah 1 provinsi yang ada di pulau jawa. Dengan jumlah penduduk sekitar 3.689.000 jiwa yang terbagi dalam 4 Kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Gunungkidul, Wonosari dan 1 Kota. Dalam dataku bappeda jogjapro, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY pada tahun 2020 sebesar Rp 1.876.706.829.354,71 dimana mengalami penurunan

sekitar 9,89% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011-2019 sendiri Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, dimana dapat dilihat melalui grafik pendapatan asli daerah.

**Grafik 1.1**

**Pendapatan Asli Daerah**



Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi DIY seperti Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta juga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang lumayan yaitu sekitar 18% - 30%, sedangkan dari tahun 2011-2019 setiap tahunnya dari setiap Kabupaten atau Kota selalu mengalami kenaikan. Sumber yang paling mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu ada pada retribusi daerah dan pajak daerah. Karena dikondisi pandemi covid-19 ini sangat mempengaruhi pendapatan yang ada, khususnya yaitu pada penurunan penerimaan pajak

daerah yang paling signifikan ditengah pandemi covid-19 ini. Pada penurunan penerimaan pajak yang mendapatkan dampak dari pandemi covid-19 yaitu seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan judul **“Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dalam mempermudah pembahasan dan pemahaman agar lebih terarah maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul?
3. Apakah Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang dibahas pada skripsi ini mengenai retribusi daerah dan pajak daerah dengan dibatasi pada jenis-jenis yang diberlakukan, dipungut, atau

dikonsisten yang ada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul selama tahun 2011 – 2020.

#### 1. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun anggaran antara lain:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- e. Retribusi pelayanan pasar
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- h. Retribusi pengolahan limbah cair
- i. Retribusi pendidikan
- j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- k. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- l. Retribusi tempat pelelangan
- m. Retribusi terminal
- n. Retribusi tempat khusus parkir
- o. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- p. Retribusi rumah potong hewan
- q. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

- r. Retribusi penjualan produk usaha daerah
- s. Retribusi izin mendirikan bangunan
- t. Retribusi izin gangguan
- u. Retribusi izin trayek

## 2. Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah yang konsisten ada di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul selama sepuluh tahun anggaran tersebut, antara lain :

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walis
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)

3. Daerah dalam skripsi ini di batasi pada pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

4. Tahun pengamatan yaitu 2011 – 2020

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi penulis  
Menambah ilmu pengetahuan mengenai pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Manfaat bagi Instansi Pemerintah  
Dapat menjadi sebagai bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk masa yang akan datang. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan untuk digunakan sebagai tambahan saran dan referensi yang dapat digunakan untuk memberikan alternatif dalam pengukuran kinerja instansi terkait.
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi penelitian mengenai pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada suatu instansi pemerintah.

## **F. Kerangka Penulisan Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Pada bab ini penulis mengemukakan teori yang melandasi pembahasan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan akan digunakan untuk menjadi dasar untuk mendukung dalam pengolahan data penelitian ini. Selain itu, juga menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dan sejenis dengan penelitian ini. Pada pengembangan hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari masalah yang dihadapi dimana yang berasal dari landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian mengenai langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan menuliskan gambaran umum penelitian, analisis data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian ini,

dan pembahasan penelitian yang merupakan perbandingan hasil penelitian dengan teori atau dengan hasil penelitian terdahulu.

## **BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan implikasi dan keterbatasan yang terjadi dalam melakukan penelitian.